



**PEMERINTAH  
KABUPATEN LUMAJANG**

**Laporan Kinerja (LKj)**

**TRIBUNAN III**

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

**TAHUN 2025**

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

**Jl. Jend. Hariyono No. 25 Lumajang Telp. (0334) 881467**

**LUMAJANG - 67314**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### 1. Gambaran Umum

##### 1.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 105 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang, pada pasal 4 menyebutkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

Pasal 4 ayat 2 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

##### 1.2 Susunan Organisasi

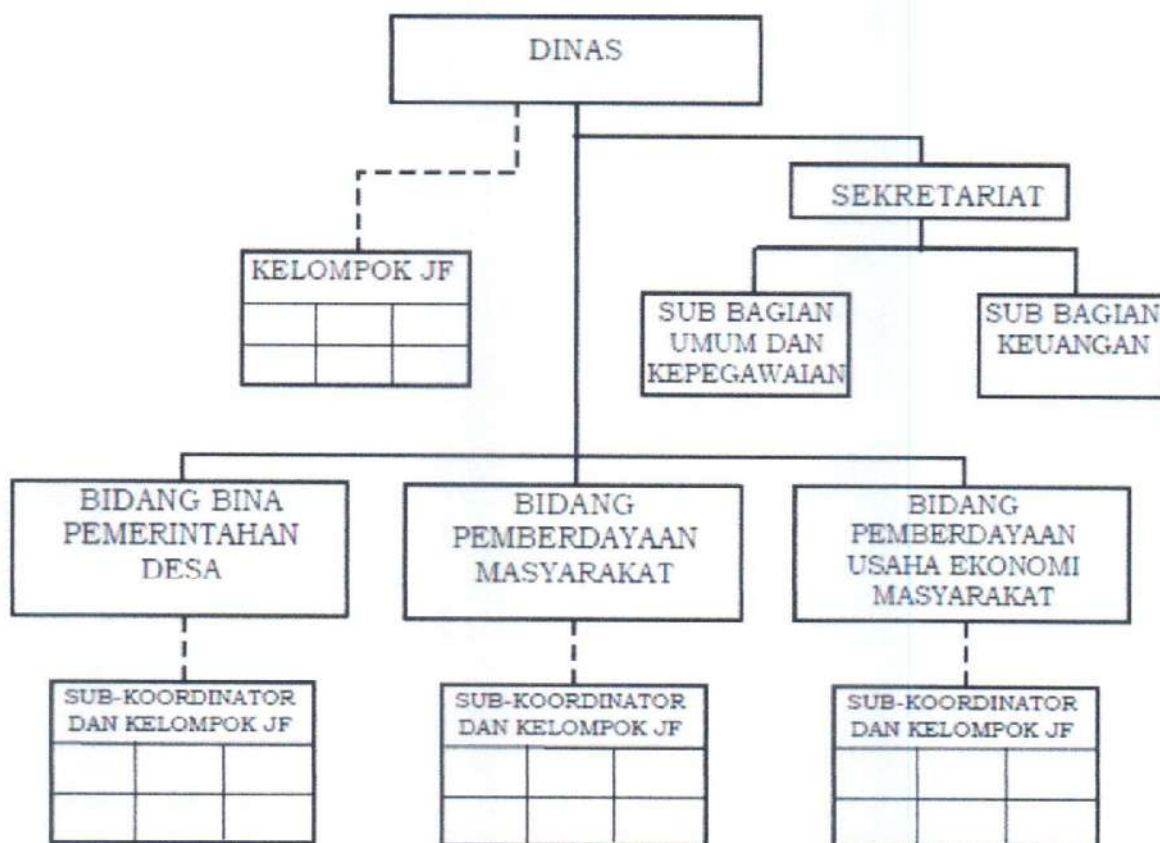
Pada Pasal 3 ayat 1 Peraturan Bupati Lumajang Nomor 105 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang, susunan organisasi Dinas terdiri dari :

- a. Sekretariat terdiri atas :
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. Sub Bagian Keuangan;

- b. Bidang Bina Pemerintahan Desa terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Berikut bagan struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang sesuai Peraturan Bupati Lumajang Nomor 105 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang, sebagai berikut :

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**



### 1.3 Aspek Strategis

#### 1.3.1 Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, berdasarkan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang didukung dengan jumlah pegawai per 1 Oktober 2025 sebanyak 239 orang yang terdiri atas PNS sebanyak 14 orang, PPPK sebanyak 7 orang, Tenaga Kerja Bulanan (TKB) dan Tenaga Pendamping Desa (TPD) sebanyak 218 orang.

Jumlah Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang berdasarkan Tingkat Pendidikan pada tahun 2025 (Tribulan III) dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1

Jumlah PNS, PPPK dan TKB Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang Tribulan III Tahun 2025

No	Status	Jml	Jenis Kelamin		Gol. Ruang				Pendidikan							Ket	
			L	P	I	II	III	IV	SD	SMP	SMA	D1	D2	D3	S1		S2
1	PNS	14	10	4		2	9	3			3			2	8	1	Org
2	PPPK	7	4	3			7								7		Org
3	TKB	218	89	129							3	1	1	2	207	4	Org

Berdasarkan status pegawai pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang Per Tribulan III tahun 2025, jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan Tenaga Kerja Bulanan (TKB) secara berturut-turut adalah sebanyak 14 orang, 7 orang, dan 218 orang. Jumlah pegawai secara keseluruhan pada Tribulan III sejumlah 239 orang.

Bedasarkan jenis kelamin terlihat bahwa sebagian besar personil PNS, PPPK dan TKB pada DPMD Kabupaten Lumajang

berjenis kelamin perempuan sebanyak 136 orang, yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 103 orang.

Berdasarkan golongan ruang dan kepangkatan, terlihat bahwa sebagian besar personil DPMD Kabupaten Lumajang mempunyai golongan II, III dan IV. Serta ditinjau berdasarkan tingkat pendidikan, terlihat bahwa rata-rata personil memiliki tingkat pendidikan S-1.

### 1.3.2 Aset yang dimiliki

Dalam upaya pelaksanaan tugas dan fungsi, DPMD Kabupaten Lumajang, memiliki ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran sebagai penunjang terhadap upaya pencapaian sasaran adalah sebagaimana dalam daftar tabel berikut ini :

Tabel 1.2  
Aset DPMD Kabupaten Lumajang  
Per Tribulan III Tahun 2025

NO	KIB	JUMLAH	KETERANGAN
1	A (Tanah)	2	Gedung DPMD dan Gedung eks DPMPTSP
2	B (Peralatan dan Mesin)	293	
3	C (Gedung dan Bangunan)	9	
4	D (Jalan, Irigasi dan Jaringan)	1	Instalasi Jaringan Listrik Panel
5	E (Aset Tetap Lainnya)	13	Tropi Kejuaraan
6	F (Konstruksi Dalam Penjaringan)	-	
	Jumlah	318	

#### 1.4 Isu Strategis

Dalam dokumen RENSTRA Tahun 2025 – 2029, Identifikasi permasalahan menjadi hal penting dalam proses analisa isu – isu strategis yang sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Isu – isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dimasa datang. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi selengkapnya sebagaimana Tabel 1.4 :

Tabel 1.1  
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi  
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

NO	POKOK MASALAH	PERMASALAHAN	AKAR MASALAH
1	2	3	4
1.	Belum semua desa di Kabupaten Lumajang berstatus desa mandiri berdasarkan perhitungan Indeks Desa	Belum optimalnya kearifan sosial budaya dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan	Belum optimalnya peran LKD dan LAD dalam membantu pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan swadaya masyarakat
			Belum terbentuknya lembaga adat desa pada desa yang berpotensi memiliki kegiatan adat
		Belum optimalnya upaya pengembangan	Belum semua desa memiliki dokumen kerjasama sesuai ketentuan

NO	POKOK MASALAH	PERMASALAHAN	AKAR MASALAH
1	2	3	4
		sumberdaya ekonomi di desa	Masih kurangnya wawasan desa terkait potensi kerjasama dengan pihak ketiga
			Belum semua desa mempunyai BUMDesa
			Belum semua BUMDesa masuk klasifikasi maju
		kurangnya kepatuhan desa terhadap tata kelola pemerintahan desa	kurangnya kepatuhan desa terhadap regulasi tata kelola keuangan desa
			kurangnya kepatuhan desa terhadap regulasi tata kelola aset desa
			Belum seluruh BUMDesa berkontribusi terhadap PADes

### 1.5 Strategi Organisasi

Hasil telaah analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah dan permasalahan pelayanan Perangkat Daerah selanjutnya akan menjadi bahan masukan dalam penyusunan isu - isu strategis. Metode penentuan isu - isu strategis pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lumajang ditentukan berdasarkan FGD. Berdasarkan hasil FGD tersebut, teridentifikasi beberapa isu strategis yang mendasar pada dinamika nasional maupun regional/lokal. Isu Strategis dalam lingkup nasional antara lain Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Jumlah Penduduk Miskin yang masih cukup besar berdasarkan berita resmi statistik, jumlah penduduk miskin nasional adalah sebesar 8,57%, di Provinsi Jawa Timur jumlah penduduk miskin sebesar 9,56 %, sedangkan di Kabupaten Lumajang jumlah penduduk miskin sebesar 8,65 % keseluruhan data diambil per September 2024. Kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat miskin akan

dapat menambah angka kemiskinan. Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menjadikan Pemerintah Kabupaten Lumajang memiliki peran yang sangat strategis dalam memfasilitasi pemerintah desa untuk meningkatkan kapasitas aparatur Pemerintahan Desa dalam pengelolaan penyelenggaraan kewenangan desa. Semakin terbukanya hubungan dengan pihak lain menjadi pendorong Kabupaten Lumajang untuk lebih meningkatkan kemampuan dan kapasitas usaha ekonomi masyarakat secara mandiri dan memiliki daya saing baik di tingkat regional maupun nasional. Isu strategis dapat disimpulkan dalam tabel 1.5 sebagai berikut :

Tabel 1.5  
Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu Klhs Yang Relevan Dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Terdapat fungsional penggerak swadaya masyarakat, tenaga pendamping desa dan tenaga pendamping profesional	Belum semua desa melaporkan dana swadaya Masyarakat	N/A	N/A	Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim	N/A	Belum optimalnya tata kelola kelembagaan desa dan keberdayaan masyarakat dalam mencapai kemandirian desa
Adanya Kader Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagai penggerak pemberdayaan masyarakat (sekitar 10.817 lembaga)	Masih adanya Badan Usaha Milik Desa / Unit Pelaksana Kegiatan Usaha dan Pasar Desa yang belum melengkapi dokumen administrasi kelembagaan	N/A	N/A	Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim	N/A	

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu Klhs Yang Relevan Dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Terdapat SDM Aparatur Pemerintah Desa sebagai penggerak tata kelola pemerintahan di Desa	Belum Optimalnya Kualitas dokumen penyelenggaraan pemerintahan desa	N/A	N/A	Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim	N/A	
Adanya dukungan anggaran dari Pemerintah Pusat (Dana Desa) dan Pemerintah Provinsi (Bantuan Keuangan Provinsi) untuk program pemberdayaan di desa	Masih adanya desa yang belum melakukan Kerjasama desa	N/A	N/A	Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim	N/A	
Terdapat inovasi Ngopeni Deso dengan metode Ngopi darat, Ngopi Teknologi Informasi (TIn), Ngopi Nusantara	Kurang optimalnya penyelenggaraan karang taruna dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)	N/A	N/A	Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim	N/A	

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu Klhs Yang Relevan Dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Adanya Kerjasama dengan BPKP dalam bentuk aplikasi Forsa Bumdes terkait ketertiban pertanggungjawaban Keuangan Desa						
Adanya Tenaga Pelatih Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) bersertifikasi Nasional sebanyak 2 orang di DPMD						

Isu strategis Implementasi Undang-Undang tentang Desa perlu didukung Kapasitas Aparatur pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan desa yang memadai, mengingat isu dimaksud memiliki pengaruh yang cukup besar dan signifikan terhadap pencapaian sasaran daerah, dimana dengan Undang-Undang ini terdapat kewajiban penyiapan masyarakat dan aparatur pemerintahan di tingkat desa untuk dapat melaksanakan perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan sekaligus pertanggungjawaban administrasi kegiatan dan keuangan sesuai dengan peraturan dan mekanisme yang berlaku. Banyaknya lembaga ekonomi mikro yang ada di desa merupakan potensi ekonomi yang perlu ditingkatkan kemampuan dan daya saingnya serta disinergikan satu dengan yang lain, untuk menghadapi era pasar bebas, sehingga produk dalam negeri mampu bersaing dengan produk luar negeri.

**BAB II**  
**PERENCANAAN KINERJA**

2.1 Target Tujuan

Tujuan merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di masa yang akan mendatang. Tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Triwulan I dan II adalah Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Perdesaan dengan indikator tujuan Persentase status Desa Mandiri sedangkan pada Triwulan III berubah dengan menyesuaikan Renstra tahun 2025-2029 adalah Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa dengan indikator tujuan Persentase Desa Mandiri merupakan hasil konversi berdasarkan Tren dari Pengukuran IDM menjadi ID mengalami kenaikan sehingga target juga berubah sesuai surat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur nomor : 000.7.2.2/14216/201.2/2025 tanggal 29 Juli 2025, Perihal Pemutakhiran Penyelarasan Target Indikator Sasaran Pembangunan dan IUP pada RPJMD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029.

Tabel 2.1  
Tujuan – Indikator

<b>Triwulan I dan II Tahun 2025</b>			
No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target
1.	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Persentase status Desa Mandiri	33,84%
<b>Perubahan Triwulan III Tahun 2025</b>			
1.	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa	Persentase Desa Mandiri	52,02%

2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang per 3 Maret 2025 dengan 3 sasaran strategis dan 3 indikator adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2  
Sasaran Strategis – Indikator Triwulan I dan II Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatnya Swadaya Masyarakat	Persentase Dana Swadaya Masyarakat	persentase	2.7%
2.	Meningkatnya peran lembaga ekonomi desa	Persentase Desa yang memiliki lembaga ekonomi desa yang aktif	persentase	67%
3.	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan desa	Persentase desa dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang berkualitas	persentase	40%

Karena ditetapkannya Peraturan Bupati Lumajang Nomor 31 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 serta memperhatikan amanat lampiran I huruf E Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 53 Tahun 2014, melakukan Perubahan Perjanjian Kinerja karena terjadi perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian dan tujuan dan sasaran akibat adanya perubahan alokasi anggaran.

Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Pasca P-APBD yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang per 1 September 2025 dengan 1 sasaran strategis dengan 4 indikator adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2  
Sasaran Strategis – Indikator Triwulan III Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa, lembaga ekonomi desa dan lembaga kemasyarakatan desa	Persentase desa dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang berkualitas	Persen	93,94%
		Persentase desa yang memiliki lembaga ekonomi desa yang aktif	Persen	31,14%
		Persentase Lembaga Adat Desa yang aktif	Persen	100%

		Persentase Dana Swadaya Masyarakat	Persen	15%
--	--	------------------------------------	--------	-----

Sasaran strategis adalah arah dan tujuan yang berfokus pada hasil yang ingin dicapai merupakan kompilasi pencapaian dan indikator kinerja, sehingga 1 (satu) sasaran strategis meningkatnya tata kelola pemerintahan desa, lembaga ekonomi desa dan lembaga kemasyarakatan desa dapat diukur melalui 4 (empat) indikator kinerja, antara lain :

1. Persentase desa dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang berkualitas
2. Persentase desa yang memiliki lembaga ekonomi desa yang aktif
3. Persentase Lembaga Adat Desa yang aktif
4. Persentase Dana Swadaya Masyarakat

Sehingga sasaran strategis ini dapat diukur melalui pencapaian indikator-indikator kinerja tersebut, sehingga dapat diketahui apakah tata kelola pemerintahan desa, lembaga ekonomi desa, dan lembaga kemasyarakatan desa telah meningkat atau tidak.

**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

**3.1 PENGUKURAN KINERJA**

A. Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis

Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bulan Juli s.d bulan September (Triwulan III Tahun 2025), dari indikator kinerja utama yaitu:

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa	Persentase Desa Mandiri	Persen	52,02%	0%	0%
1.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa, lembaga ekonomi desa dan lembaga kemasyarakatan desa	Persentase desa dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang berkualitas	Persen	93,94%	93,94%	100%
		Persentase desa yang memiliki lembaga ekonomi desa yang aktif	Persen	31,14%	32,61%	104,72%
		Persentase Lembaga Adat Desa yang aktif	Persen	100%	100%	100%
		Persentase Dana Swadaya Masyarakat	Persen	15%	1,59%	10,6%
<b>Rata-rata Capaian Kinerja Tahun 2025 (Triwulan III)</b>						<b>78,83%</b>

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja indikator tujuan belum ada realisasi dikarenakan hasil pendataan indeks desa tahun 2025 baru diketahui di Triwulan IV, sesuai dengan surat dari Kemendes tanggal 20 Maret 2025 nomor : 554/PDP.03.04/III/2025.

Pada sasaran meningkatnya tata kelola pemerintahan desa, lembaga ekonomi desa dan lembaga kemasyarakatan desa ada 3 indikator kinerja yang sudah memenuhi target di Tribulan, ada 1 (satu) indikator kinerja

yang realisasinya sudah melebihi target yaitu, Persentase desa yang memiliki lembaga ekonomi desa yang aktif, realisasi di Triwulan III ini adalah 32,61% dari target 31,14%, karena sebagian besar UPK eks PNPM telah bersedia untuk bertransformasi menjadi BUMDesMa LKD, adanya dukungan dari DPMD Provinsi Jawa Timur yang mampu menjembatani permasalahan BUMDesMa LKD dengan Kemendes PDT, kemudahan pengurusan sertifikat badan hukum bagi BUMDesa melalui website, sehingga dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja dan adanya alokasi dana desa 20% untuk ketahanan pangan melalui penyertaan modal kepada BUM Desa, alokasi BKK Provinsi Jawa Timur Program Desa Berdaya dan Pemberdayaan BUMDesa yang dapat membantu desa di Kabupaten Lumajang dalam meningkatkan produktivitas usaha ekonomi lembaga ekonomi desa.

Sedangkan 2 (dua) indikator kinerja yaitu Persentase desa dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang berkualitas terealisasi 93,94 % dari target 93,94% sudah tercapai 100%, karena Meningkatnya tingkat kepatuhan Desa dalam tertib dan tepat waktu administrasi karena intensitas pembinaan melalui berbasis teknologi keberadaan Tenaga Pendamping Desa baik di Desa, Kecamatan dan Kabupaten sangat membantu dalam mendampingi penyelesaian pekerjaan di Desa, Koordinasi aktif dengan aparatur Pemerintah Desa melalui cara mengingatkan baik tertulis maupun via whatsapp untuk menyelesaikan pekerjaan di Desa, dukungan Pemerintah Kecamatan dalam memfasilitasi Desa dan .

Dan indikator kinerja Persentase Lembaga Adat Desa yang Aktif terealisasi 100 % dari target 100% sudah tercapai 100%, karena Lembaga adat desa yang aktif dan jumlah lembaga adat desa yang terbentuk sebanyak 6 (enam), belum semua desa membentuk Lembaga Adat Desa.

indikator kinerja Persentase Dana Swadaya Masyarakat terealisasi 1,59 % dari target 15% tercapai 10,6%, karena belum semua desa melaporkan dana swadaya masyarakat.

#### B. Capaian Kinerja Program yang Menunjang Kinerja Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tabel 3.1

Tabel Program yang Menunjang Kinerja Sasaran DPMD

No	Program	Target %	Keterangan
1.	Program Penataan Desa	100%	Langsung
2.	Program Peningkatan Kerjasama Desa	55%	Langsung
3.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	100%	Langsung
4.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	100%	Langsung

Pada Triwulan III pada tahun 2025 Program yang langsung berhubungan dengan capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ada empat Program yaitu Program Penataan Desa, Program Peningkatan Kerjasama Desa, Program Administrasi Pemerintahan Desa, dan Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat.

Capaian Kinerja Program Penataan adalah 50% dari hasil target 2 Desa dan hanya 1 Desa yang sudah terfasilitasi yaitu Desa Sumberwuluh Kecamatan Candipuro terkait Penghapusan Dusun di Desa Sumberwuluh.

Capaian Kinerja Program Peningkatan Kerjasama Desa realisasi 50% (sudah terealisasi 10 dokumen kerja sama desa dari target 11 dokumen) capaian kinerja adalah 90,91% dari jumlah kerjasama desa yang telah ditetapkan dengan dokumen kerja sama dan masih berlaku adalah sebanyak 10 kerja sama desa, yang meliputi 8 kerja sama antar desa yang menjadi dasar pembentukan BUMDesMa LKD, 1 dokumen kerja sama antar desa dengan pihak ketiga, dan 1 dokumen kerja sama yang menjadi dasar pembentukan BUMDesMa Kawasan. jumlah kerjasama desa yang telah ditetapkan dengan dokumen kerja sama dan masih berlaku adalah sebanyak 10 kerja sama desa, yang meliputi 8 kerja sama antar desa yang menjadi dasar pembentukan BUMDesMa LKD, 1 dokumen kerja sama antar desa dengan pihak ketiga, dan 1

dokumen kerja sama yang menjadi dasar pembentukan BUMDesMa Kawasan.

Capaian Kinerja Program Administrasi Pemerintahan Desa diampu oleh 3 bidang, untuk Bidang Bina Pemerintahan Desa sudah terealisasi 93.94% hasil tersebut didapat dari desa yang sudah tepat waktu dalam pengumpulan LPPDesa 2025, RKPDesa 2025, LRA 2024 dan APBDesa 2025. Bidang pemberdayaan masyarakat capaiannya adalah 100% dari hasil rekap data desa dan kelurahan yang input data epdeskel 2025 dan lembaga adat desa yang aktif dan Bidang pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat capaian 42,39% (78 dari 184 BUMDes susah berbadan hukum, berdasarkan data SID.

Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat di ampu oleh bidang pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat. Bidang pemberdayaan masyarakat capaiannya adalah 100% dari hasil rekap inventarisasi data Lembaga Kemasyarakatan se Kabupaten Lumajang. Sedangkan bidang pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat capaian 36,46% (66 dari 69 LED telah terfasilitasi dan memiliki unit usaha yang produktif) dari hasil desa yang telah difasillitasi terkait peningkatan pendapatan asli desa.

### C. PENYAJIAN DATA KINERJA

1. Persentase desa dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang berkualitas dihitung dari Jumlah desa dengan penyelenggaraan pemerintahan desa yang berkualitas dibagi Jumlah desa seluruhnya di Kabupaten Lumajang dikali 100%. Di Triwulan III realisasi Persentase desa dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang berkualitas adalah 93.94%. Perhitungan :

$$\frac{186}{198} \times 100\% = 93.94\%$$

2. Persentase desa yang memiliki lembaga ekonomi desa yang aktif dihitung dari Jumlah lembaga ekonomi desa (BUMDes) yang aktif dibagi Jumlah bumdes yang ada di Kabupaten Lumajang dikali 100. Di Triwulan III realisasi Persentase desa yang memiliki lembaga ekonomi desa yang aktif adalah 32,61%. Perhitungan :

$$\frac{60}{184} \times 100\% = 32,61\%$$

3. Persentase Lembaga Adat Desa yang aktif dihitung dari Lembaga adat desa yang aktif dibagi jumlah lembaga adat desa yang terbentuk dikali 100. Di Triwulan III realisasi Persentase Lembaga Adat Desa yang aktif adalah 100 %. Perhitungan :

$$\frac{6}{6} \times 100\% = 100\%$$

4. Persentase Dana Swadaya Masyarakat dihitung dari Jumlah dana swadaya masyarakat dibagi Jumlah anggaran APBDes seluruh desa dikali 100%. Di Triwulan III realisasi Persentase Dana Swadaya Masyarakat adalah 1,59%. Perhitungan :

$$\frac{6.445.808.000}{404.229.251.625} \times 100\% = 1,59\%$$

### 3.2 Analisa Capaian Kinerja

A. Analisa Faktor Pendukung Keberhasilan Capaian Kinerja sasaran Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa, lembaga ekonomi desa dan lembaga kemasyarakatan desa

1. Indikator Kinerja : Persentase desa dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang berkualitas
  - a. Meningkatnya tingkat kepatuhan Desa dalam tertib dan tepat waktu administrasi karena intensitas pembinaan melalui berbasis teknologi
  - b. Pembinaan berkala dan berjenjang oleh Kabupaten dan Kecamatan sesuai fungsi Binwas
  - c. Monitoring Terpadu
  - d. Menurunkan Tim terhadap permasalahan-permasalahn khusus yang ada di Desa
  - e. Optimalisasi peran TPP (Tim Pendamping Profesional)
2. Indikator Kinerja : Persentase desa yang memiliki lembaga ekonomi desa yang aktif
  - a. Sebagian besar UPK eks PNPM telah bersedia untuk bertransformasi menjadi BUMDesMa LKD
  - b. Adanya dukungan dari DPMD Provinsi Jawa Timur yang mampu menjembatani permasalahan BUMDesMa LKD dengan Kemendes PDT
  - c. Kemudahan pengurusan sertifikat badan hukum bagi BUMDesa melalui website, sehingga dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja

d. Adanya alokasi dana desa 20% untuk ketahanan pangan melalui penyertaan modal kepada BUM Desa, alokasi BKK Provinsi Jawa Timur Program Desa Berdaya dan Pemberdayaan BUMDesa yang dapat membantu desa di Kabupaten Lumajang dalam meningkatkan produktivitas usaha ekonomi lembaga ekonomi desa

3. Indikator Kinerja : Persentase Lembaga Adat Desa yang aktif

a. Adanya potensi adat yang ada di masing-masing desa

b. Adat diterima sebagai pranata sosial di masyarakat

4. Indikator Kinerja : Persentase Dana Swadaya Masyarakat

a. Peran Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagai motor penggerak swadaya masyarakat, baik swadaya murni maupun swadaya pendukung

b. Tata nilai sosial masyarakat yang kuat dengan prinsip gotong royong.

B. Analisa Faktor Penghambat Keberhasilan Capaian Kinerja sasaran Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa, lembaga ekonomi desa dan lembaga kemasyarakatan desa

1. Indikator Kinerja : Persentase desa dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang berkualitas

a. Belum optimalnya teknologi dan digitalisasi

2. Indikator Kinerja : Persentase desa yang memiliki lembaga ekonomi desa yang aktif

a. Masih adanya kendala dalam penyusunan AD/ART BUMDesMa LKD terkait kewajiban dan hak antara kelembagaan dengan Pemerintah Desa dalam menunjang legalitas (Permakades) di beberapa BUMDesMa LKD.

b. Adanya prioritas provinsi dalam pengembangan kawasan perdesaan berbasis ketahanan pangan, sehingga menunda fasilitasi pengembangan kawasan perdesaan berbasis potensi wisata.

c. Keterbatasan kemampuan sumber daya manusia di BUM Desa dalam melengkapi hasil verifikasi dari tim verifikator Kemendes PDT untuk penerbitan sertifikat badan hukum BUM Desa, serta adanya pergantian personil yang menangani pendaftaran badan hukum BUM Desa.

- d. Masih kurangnya inisiatif dan inovasi dari BUMDesa dalam menangkap potensi yang ada di desa dalam rangka mengembangkan unit usaha BUMDesa.
  - e. Belum optimalnya fungsi kelembagaan pengelola lembaga ekonomi desa, sehingga tidak dapat berjalan dengan baik.
3. Indikator Kinerja : Persentase Lembaga Adat Desa yang aktif
- a. Masih belum semua desa membentuk Lembaga Adat Desa
4. Indikator Kinerja : Persentase Dana Swadaya Masyarakat
- a. Belum semua desa melaporkan dana swadaya masyarakat
  - b. Belum tertibnya pencatatan dan pelaporan yang ada dan dikembangkan oleh masyarakat
  - c. Masih kurangnya pemahaman bahwa swadaya hanya berupa uang, padahal kontribusi In-Kind berupa tenaga, material total dapat dihitung sebagai swadaya
- C. Upaya/ Solusi Untuk Mengatasi Hambatan Dalam Mencapai Kinerja Capaian Kinerja sasaran Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa, lembaga ekonomi desa dan lembaga kemasyarakatan desa
1. Indikator Kinerja : Persentase desa dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang berkualitas
- a. Pembinaan Melalui *webinar series* setiap hari Jum'at, yaitu JUMAT BERKAH KENTANG PEDES
  - b. Melakukan monitoring, baik secara langsung (turun ke desa) maupun melalui korespondensi untuk pengumpulan data.
2. Indikator Kinerja : Persentase desa yang memiliki lembaga ekonomi desa yang aktif
- a. Pembinaan terhadap kelembagaan BUMDesMa LKD dalam meningkatkan sinergitas kelembagaan dengan desa, sehingga pengurus dapat berperan dalam melengkapi dokumen administrasi kerja sama desa dan meningkatkan status legalitas BUMDesMa LKD.
  - b. Bersinergi dengan Forum BUMDesa Provinsi, DPMD Provinsi, Forum BUMDesa Kabupaten untuk dapat mendampingi BUMDesa di Kabupaten Lumajang dalam percepatan penerbitan sertifikat badan hukum BUM Desa.
  - c. Meningkatkan upaya pembinaan kepada pengelola BUMDesa agar mampu menangkap peluang-peluang usaha sesuai potensi

yang ada di desa serta mampu mengelola manajemen dan kelembagaan BUMDesa bersinergi dengan kecamatan, perangkat daerah teknis lain, serta stakeholder lain yang terkait.

3. Indikator Kinerja : Persentase Lembaga Adat Desa yang aktif
  - a. Belum semua desa memahami potensi adat yang ada di desanya, sehingga masih sedikit yang dilaporkan
  - b. Penguatan terhadap Perdes LAD belum optimal
4. Indikator Kinerja : Persentase Dana Swadaya Masyarakat
  - a. Melalui evaluasi dan monitoring terhadap tertibnya pencatatan dan pelaporan yang ada dan dikembangkan oleh masyarakat

#### 1. Analisis Efisiensi Pengguna Sumber daya

Tabel Penghitungan Efisiensi Sumber Daya Triwulan II Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja %	Penyerapan Anggaran %	Tingkat Efisiensi %
	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa	Persentase Desa Mandiri	0%	57,42%	-57,42%
1.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa, lembaga ekonomi desa dan lembaga kemasyarakatan desa	Persentase desa dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang berkualitas	100%	40,38%	59,62%
		Persentase desa yang memiliki lembaga ekonomi desa yang aktif	104,72%	47,91%	56,81%
		Persentase Lembaga Adat Desa yang aktif	100%	25,87%	74,13%
		Persentase desa dengan penyelenggaraan Pemerintahan	10,6%	54,39%	-43,79

		Desa yang berkualitas			
--	--	-----------------------	--	--	--

Bahwa pada Triwulan III Tahun 2025 realisasi anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebesar 20.68% sedangkan capaian kinerja sebesar 0%. Hal ini dikarenakan hasil pendataan indeks desa tahun 2025 baru diketahui di Tribulan III/ Tribulan IV, sesuai dengan surat dari Kemendes tanggal 20 Maret 2025 nomor : 554/PDP.03.04/III/2025 IV. Realisasi anggaran pada indikator pertama adalah 40,38% sedangkan capaian kinerja sebesar 100% sehingga ada efisiensi sebesar 59,62%. Realisasi anggaran pada indikator kedua adalah 47,91% sedangkan capaian kinerja sebesar 104,72% sehingga ada efisiensi sebesar 56,81%. Realisasi anggaran pada indikator ketiga adalah 25,87% sedangkan capaian kinerja sebesar 100% sehingga ada efisiensi sebesar 74,13%. Realisasi anggaran pada indikator keempat adalah 54,39% sedangkan capaian kinerja sebesar 10,6% sehingga ada efisiensi sebesar - 47,39%.

2. Analisis program yang menunjang capaian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tabel Program yang Menunjang Triwulan III Tahun 2025

No.	Program	Capaian Kinerja %	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lumajang	100%	Tidak Langsung
2.	Program Penataan Desa	100%	Langsung
3.	Program Peningkatan Kerjasama Desa	55%	Langsung
4.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	100%	Langsung
5.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	100%	Langsung

Pada Triwulan III tahun 2025 Program yang langsung berhubungan dengan capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ada 4 (empat) Program yaitu Program Penataan Desa, Program Peningkatan Kerjasama Desa, Program Administrasi Pemerintahan Desa, dan Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat.

### 3.7 Realisasi Anggaran

#### **CAPAIAN ANGGARAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TRIWULAN III TAHUN 2025**

<b>NO</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN</b>	<b>ANGGARAN (Rp)</b>	<b>REALISASI (Rp.)</b>	<b>CAPAIAN</b>
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>6.889.116.624</b>	<b>4.434.616.281</b>	<b>64,37%</b>
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>21.775.500</b>	<b>13.904.500</b>	<b>63,85%</b>
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.823.000	6.516.000	83,29%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.000.000	0	0%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.952.500	3.952.500	100 %
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.986.000	1.218.000	61,33%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.014.000	2.218.000	73,59%

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2.965.645.234</b>	<b>1.898.541.988</b>	<b>64,02%</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.884.095.734	1.851.911.988	64,21%
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	67.956.000	38.018.000	55,95%
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	3.354.500	1.422.000	42,39%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.315.000	5.312.000	99,94%
	Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	4.036.000	1.598.000	39,59%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	888.000	280.000	31,53%
	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>4.212.000</b>	<b>3.023.000</b>	<b>71,77%</b>
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.536.000	1.526.000	99,35%
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	768.000	384.000	50%
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.908.000	1.113.000	58,33%

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>2.480.000</b>	<b>2.480.000</b>	<b>100%</b>
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2.480.000	2.480.000	100%
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>106.366.633</b>	<b>70.676.509</b>	<b>66,45%</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.231.759	9.127.863	98,87%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	29.301.684	26.581.136	90,72%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.848.190	4.009.510	51,09%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	59.985.000	30.958.000	51,61%
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>90.654.810</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	90.654.810	0	0%
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>3.601.182.257</b>	<b>2.357.162.628</b>	<b>65,46%</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	297.000	241.032	81,16%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	228.900.000	38.271.389	16,72%

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.371.985.257	2.318.650.207	68,76%
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>668.434.643</b>	<b>88.827.656</b>	<b>13.29%</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	146.305.000	68.697.656	46,96%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	41.150.000	20.130.000	48,92%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	480.979.643	0	0%
	<b>PROGRAM PENATAAN DESA</b>	<b>38.602.000</b>	<b>3.375.000</b>	<b>8,74%</b>
	Penyelenggaraan Penataan Desa	38.602.000	3.375.000	8,74%
	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	38.602.000	3.375.000	8,74%
	<b>PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA</b>	<b>46.652.000</b>	<b>19.655.000</b>	<b>42,13%</b>
	<b>Fasilitasi Kerja sama antar Desa</b>	<b>46.652.000</b>	<b>19.655.000</b>	<b>42,13%</b>
	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	20.612.000	5.745.000	27,87%
	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	23.995.000	13.910.000	57,97%

<b>NO</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN</b>	<b>ANGGARAN (Rp)</b>	<b>REALISASI (Rp.)</b>	<b>CAPAIAN</b>
	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	2.045.000	0	0%
	<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>6.622.125.800</b>	<b>3.198.815.350</b>	<b>48,30%</b>
	<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</b>	<b>6.622.125.800</b>	<b>3.198.815.350</b>	<b>48,30%</b>
	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	133.388.300	115.807.350	86,82%
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	26.800.000	12.675.000	47,29%
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	60.585.000	27.500.000	45,39%
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	5.948.802.000	2.892.205.000	48,62 %
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	0	0	0%
	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	9.900.000	795.000	8,03%
	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	84.009.000	45.907.000	54,65%
	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa	97.750.000	40.425.000	41,36%

<b>NO</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN</b>	<b>ANGGARAN (Rp)</b>	<b>REALISASI (Rp.)</b>	<b>CAPAIAN</b>
	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	13.770.000	825.000	5,99%
	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	17.615.000	11.250.000	63,87%
	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	35.567.000	28.632.000	80,50%
	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	27.622.000	12.744.000	46,14%
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	0	0	0%
	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	158.975.000	2.925.000	1,84%
	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	7.342.500	7.125.000	97,04%
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>	<b>807.740.525</b>	<b>264.007.525</b>	<b>32,68%</b>
	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>807.740.525</b>	<b>264.007.525</b>	<b>32,68%</b>

<b>NO</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN</b>	<b>ANGGARAN (Rp)</b>	<b>REALISASI (Rp.)</b>	<b>CAPAIAN</b>
	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	48.630.000	16.845.000	34,64%
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	113.934.175	29.480.000	25,87%
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	138.705.000	52.553.000	37,89%
	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	22.241.000	13.600.000	61,51%
	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	3.070.000	0	0%
	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	481.160.350	151.529.525	31,49%
	<b>JUMLAH</b>	<b>14.975.871.402</b>	<b>7.920.469.156</b>	<b>52,89%</b>

1. Tanggapan Atasan Langsung

- Laporan kurang baik
- Laporan sudah baik
- Laporan diperbaiki
- Realisasi diteliti ulang
- Capaian diteliti ulang
- Lain-lain .....(ditulis tangan bila ada)

Jumlah dan nama pilihan Disposisi dapat diisi sesuai kebutuhan yang diperlukan dengan mencentang ( √ )

### **BAB III**

#### **PENUTUP**

Berdasarkan analisis capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Triwulan III Tahun 2025, dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja indikator tujuan belum ada realisasi dikarenakan hasil pendataan indeks desa tahun 2025 baru diketahui di Triwulan IV, sesuai dengan surat dari Kemendes tanggal 20 Maret 2025 nomor : 554/PDP.03.04/III/2025.
2. Pada sasaran meningkatnya tata kelola pemerintahan desa, lembaga ekonomi desa dan lembaga kemasyarakatan desa ada 3 indikator kinerja yang sudah memenuhi target di Tribulan, ada 1 (satu) indikator kinerja yang realisasinya sudah melebihi target yaitu, Persentase desa yang memiliki lembaga ekonomi desa yang aktif, realisasi di Triwulan III ini adalah 32,61% dari target 31,14%
3. Persentase desa dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang berkualitas terealisasi 93,94 % dari target 93,94% sudah tercapai 100%
4. Persentase Lembaga Adat Desa yang Aktif terealisasi 100 % dari target 100% sudah tercapai 100%, karena Lembaga adat desa yang aktif dan jumlah lembaga adat desa yang terbentuk sebanyak 6 (enam), belum semua desa membentuk Lembaga Adat Desa.
5. Persentase Dana Swadaya Masyarakat terealisasi 1,59 % dari target 15% tercapai 10,6%, karena belum semua desa melaporkan dana swadaya masyarakat.

Berdasarkan hasil kinerja yang telah dicapai pada Triwulan III Tahun 2025, maka tindak lanjut dan upaya yang dapat dilaksanakan pada masa mendatang sehingga dapat mempertahankan dan / atau meningkatkan kinerja, sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi dengan OPD/ pihak terkait
2. Memaksimalkan pembinaan dan fasilitasi ke desa

3. Pembinaan Melalui *webinar series* setiap hari Jum'at, yaitu JUMAT BERKAH KENTANG PEDES
4. Melakukan monitoring, baik secara langsung (turun ke desa) maupun melalui korespondensi untuk pengumpulan data.

Lumajang, 3 Oktober 2025

Kepala Dinas  
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



**BAYU RUSWANTORO, S.STP**  
NIP. 19791016 199810 1 002



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**  
 Jalan Jendral Hariyono Nomor 25, Kelurahan Jogotrunan, Kecamatan Lumajang,  
 Kabupaten Lumajang, Jawa Timur 67314,  
 Telepon (0334) 881467, Faksimile (0334) 881467,  
 Laman: dpmdesa.lumajangkab.go.id, Pos-el: dpm.desa@lumajangkab.go.id

**BUKTI DUKUNG MONEV KINERJA TRIBULAN III Tahun 2025**

No.	Sasaran	Indikator	Target	Formulasi	Definisi Operasional
	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa	Persentase Desa Mandiri	52,02%	Jumlah desa mandiri berdasarkan Indeks Desa per tahun dibagi Jumlah seluruh desa dikali 100	Persentase Desa Mandiri adalah status Desa Mandiri berdasarkan Penilaian Indeks Desa.
1.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa, lembaga ekonomi desa dan lembaga kemasyarakatan desa	Persentase desa dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang berkualitas	93,94%	Jumlah desa dengan penyelenggaraan pemerintahan desa yang berkualitas <b>dibagi</b> Jumlah desa seluruhnya di Kabupaten Lumajang <b>dikali</b> 100	Desa berkualitas adalah Desa yang menyusun APBDes, RKPDes, LPPDes dan LRA tepat waktu (harus terpenuhi 4 kriteria tersebut)
		Persentase desa yang memiliki lembaga ekonomi desa yang aktif	31,14%	Jumlah lembaga ekonomi desa (BUMDes) yang aktif <b>dibagi</b> Jumlah bumdes yang ada di Kabupaten Lumajang <b>dikali</b> 100	Komponen lembaga ekonomi desa (BUMDes) yang aktif berdasarkan indikator pada indeks desa (status badan hukum bumdes, status keaktifan usaha) dibagi jumlah total bumdes yang ada di kabupaten lumajang
		Persentase Lembaga Adat Desa yang aktif	100%	Lembaga adat desa yang aktif <b>dibagi</b> jumlah lembaga adat desa yang terbentuk <b>dikali</b> 100	Kriteria Lembaga adat desa yang Aktif adalah LAD yang melaksanakan kegiatan adat secara rutin. Target keaktifan LAD setiap tahun sebesar 100%
		Persentase Dana Swadaya Masyarakat	15%	Jumlah dana swadaya masyarakat <b>dibagi</b> Jumlah anggaran APBDes seluruh desa <b>dikali</b> 100	Dana swadaya masyarakat terdiri dari dana swadaya murni dan dana swadaya pendukung kegiatan pembangunan rumah ibadah, infrastruktur desa, fasilitas umum

					desa, kegiatan sosial, keagamaan dan PHBN. Swadaya Murni adalah kegiatan yang pendanaannya 100% dari masyarakat. Swadaya pendukung adalah kegiatan yang pendanaannya sebagian dari Pemerintah
--	--	--	--	--	---

## Perhitungan realisasi

### ▪ Realisasi

- Jumlah desa mandiri berdasarkan Indeks Desa per tahun dibagi Jumlah seluruh desa dikali 100 :

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja indikator tujuan belum ada realisasi dikarenakan hasil pendataan indeks desa tahun 2025 baru diketahui di Triwulan IV, sesuai dengan surat dari Kemendes tanggal 20 Maret 2025 nomor : 554/PDP.03.04/III/2025.

1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa, lembaga ekonomi desa dan lembaga kemasyarakatan desa :
  - a. Jumlah desa dengan penyelenggaraan pemerintahan desa yang berkualitas **dibagi** Jumlah desa seluruhnya di Kabupaten Lumajang **dikali** 100 terealisasi 93,94%
 
$$\frac{186}{198} \times 100\% = 93,94\%$$
  - b. Jumlah lembaga ekonomi desa (BUMDes) yang aktif **dibagi** Jumlah bumdes yang ada di Kabupaten Lumajang **dikali** 100 terealisasi 32,61%
 
$$\frac{60}{184} \times 100\% = 32,61\%$$
  - c. Lembaga adat desa yang aktif **dibagi** jumlah lembaga adat desa yang terbentuk **dikali** 100 terealisasi 100%
 
$$\frac{6}{6} \times 100\% = 100\%$$
  - d. Jumlah dana swadaya masyarakat **dibagi** Jumlah anggaran APBDes seluruh desa **dikali** 100 terealisasi 1,59%
 
$$\frac{6.445.808.000}{404.229.251.625} \times 100\% = 1,59\%$$

### ▪ Capaian = Realisasi / Target x 100%

- Jumlah desa mandiri berdasarkan Indeks Desa per tahun dibagi Jumlah seluruh desa dikali 100 : Berdasarkan hasil pengukuran kinerja indikator tujuan belum ada realisasi dikarenakan hasil pendataan indeks desa tahun 2025 baru diketahui di Triwulan IV, sesuai dengan surat dari Kemendes tanggal 20 Maret 2025 nomor : 554/PDP.03.04/III/2025.
2. Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa, lembaga ekonomi desa dan lembaga kemasyarakatan desa :

- a. Persentase desa dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang berkualitas dihitung dari Jumlah desa dengan penyelenggaraan pemerintahan desa yang berkualitas dibagi Jumlah desa seluruhnya di Kabupaten Lumajang dikali 100%. Di Triwulan III realisasi Persentase desa dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang berkualitas adalah 93.94%. Perhitungan :

$$\frac{93.94 \%}{93.94 \%} \times 100\% = 100\%$$

- b. Persentase desa yang memiliki lembaga ekonomi desa yang aktif dihitung dari Jumlah lembaga ekonomi desa (BUMDes) yang aktif dibagi Jumlah bumdes yang ada di Kabupaten Lumajang dikali 100. Di Triwulan III realisasi Persentase desa yang memiliki lembaga ekonomi desa yang aktif adalah 32,61%. Perhitungan :

$$\frac{32.61 \%}{31,14 \%} \times 100\% = 104,72\%$$

- c. Persentase Lembaga Adat Desa yang aktif dihitung dari Lembaga adat desa yang aktif dibagi jumlah lembaga adat desa yang terbentuk dikali 100. Di Triwulan III realisasi Persentase Lembaga Adat Desa yang aktif adalah 100 %. Perhitungan :

$$\frac{100\%}{100\%} \times 100\% = 100\%$$

- d. Jumlah dana swadaya masyarakat **dibagi** Jumlah anggaran APBDes seluruh desa **dikali** 100

Persentase Dana Swadaya Masyarakat dihitung dari Jumlah dana swadaya masyarakat dibagi Jumlah anggaran APBDes seluruh desa dikali 100%. Di Triwulan III realisasi Persentase Dana Swadaya Masyarakat adalah 1,59%. Perhitungan :

$$\frac{1.59\%}{15\%} \times 100\% = 10,6 \%$$

▪ Bukti dukung berupa :

1. Perubahan Perjanjian Kinerja
2. Dokumen Bukti Dukung Data Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang Berkualitas
3. Dokumen Bukti Dukung Data Kinerja Lembaga Ekonomi Desa yang Aktif
4. Dokumen Bukti Dukung Data Kinerja Lembaga Adat Desa yang Aktif
5. Dokumen Bukti Dukung Data Kinerja Dana Swadaya Masyarakat

Lumajang, 3 Oktober 2025

Kepala Dinas  
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



**BAYU RUSWANTORO, S.STP**  
NIP. 19791016 199810 1 002



## PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **BAYU RUSWANTORO, S.STP**

Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Lumajang

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ir. Hj. INDAH AMPERAWATI, M.Si.**

Jabatan : Bupati Lumajang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lumajang, 1 September 2025

Pihak Kedua  
  
**Ir. Hj. INDAH AMPERAWATI, M.Si.**

Pihak Pertama  
  
**BAYU RUSWANTORO, S.STP**  
NIP. 19791016 199810 1 002

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**  
**KABUPATEN LUMAJANG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa, lembaga ekonomi desa dan lembaga kemasyarakatan desa	Persentase desa dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang berkualitas	93,94%
		Persentase desa yang memiliki lembaga ekonomi desa yang aktif	31,14%
		Persentase Lembaga Adat Desa yang aktif	100%
		Persentase Dana Swadaya Masyarakat	15%

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KET
1	PROGRAM PENATAAN DESA	Rp. 38.602.000,00	APBD KAB.
2	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Rp. 46.652.000,00	APBD KAB.
3	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Rp. 6.622.125.800,00	APBD KAB.
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Rp. 807.740.525,00	APBD KAB.
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG	Rp. 7.460.751.077	APBD KAB.
	JUMLAH	Rp. 14.975.871.402,00	

Lumajang, 1 September 2025

BUPATI LUMAJANG



**Ir. Hj. INDAH AMPERAWATI, M.Si.**

KEPALA DINAS  
 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
 KABUPATEN LUMAJANG



**BAYU RUSWANTORO, S.STP**  
 NIP. 19791016 199810 1 002

**APBDESA TAHUN ANGGARAN 2025  
PENETAPAN TEPAT WAKTU DAN TIDAK TEPAT WAKTU**

NO	NAMA KECAMATAN	DESA	DOKUMEN	TANGGAL POSTING	STATUS
1	2	3	4	5	6
1	TEMPURSARI	TEGALREJO	APBDESA	31 DESEMBER 2024	TEPAT WAKTU
		BULUREJO	APBDESA	30 DESEMBER 2024	TEPAT WAKTU
		PUROREJO	APBDESA	30 DESEMBER 2024	TEPAT WAKTU
		TEMPUREJO	APBDESA	30 DESEMBER 2024	TEPAT WAKTU
		TEMPURSARI	APBDESA	31 DESEMBER 2024	TEPAT WAKTU
		PUNDUNGSARI	APBDESA	30 DESEMBER 2024	TEPAT WAKTU
		KALIULING	APBDESA	31 DESEMBER 2024	TEPAT WAKTU
2	PRONOJIWO	SIDOMULYO	APBDESA	30 DESEMBER 2024	TEPAT WAKTU
		PRONOJIWO	APBDESA	30 DESEMBER 2024	TEPAT WAKTU
		TAMANAYU	APBDESA	30 DESEMBER 2024	TEPAT WAKTU
		SUMBERURIP	APBDESA	30 DESEMBER 2024	TEPAT WAKTU
		ORO-ORO OMBO	APBDESA	30 DESEMBER 2024	TEPAT WAKTU
		SUPITURANG	APBDESA	30 DESEMBER 2024	TEPAT WAKTU
3	CANDIPURO	JUGOSARI	APBDESA	31 DESEMBER 2024	TEPAT WAKTU
		JARIT	APBDESA	31 DESEMBER 2024	TEPAT WAKTU
		CANDIPURO	APBDESA	31 DESEMBER 2024	TEPAT WAKTU
		SUMBEREJO	APBDESA	17 FEBRUARI 2025	TIDAK TEPAT WAKTU
		SUMBER WULUH	APBDESA	31 DESEMBER 2024	TEPAT WAKTU
		SUMBERMUJUR	APBDESA	2 JANUARI 2025	TIDAK TEPAT WAKTU
		PENANGGAL	APBDESA	31 DESEMBER 2024	TEPAT WAKTU
		TAMBAHREJO	APBDESA	31 DESEMBER 2024	TEPAT WAKTU
		KLOPOSAWIT	APBDESA	31 DESEMBER 2024	TEPAT WAKTU
TUMPENG	APBDESA	31 DESEMBER 2024	TEPAT WAKTU		
4	PASIRIAN	GONDORUSO	APBDESA	30 DESEMBER 2024	TEPAT WAKTU
		KALIBENDO	APBDESA	22 JANUARI 2025	TIDAK TEPAT WAKTU
		BADES	APBDESA	30 DESEMBER 2024	TEPAT WAKTU
		BAGO	APBDESA	05 FEBRUARI 2025	TIDAK TEPAT WAKTU
		SELOK AWAR-AWAR	APBDESA	30 DESEMBER 2024	TEPAT WAKTU
		CONDRO	APBDESA	30 DESEMBER 2024	TEPAT WAKTU
		MADUREJO	APBDESA	30 DESEMBER 2024	TEPAT WAKTU
		PASIRIAN	APBDESA	30 DESEMBER 2024	TEPAT WAKTU
		SEMEMU	APBDESA	30 DESEMBER 2024	TEPAT WAKTU
		NGUTER	APBDESA	10 JANUARI 2025	TIDAK TEPAT WAKTU
SELOKANYAR	APBDESA	30 DESEMBER 2024	TEPAT WAKTU		
5	TEMPEH	PANDANWANGI	APBDESA	27 DESEMBER 2024	TEPAT WAKTU
		SUMBERJATI	APBDESA	30 DESEMBER 2024	TEPAT WAKTU
		TEMPEH KIDUL	APBDESA	27 DESEMBER 2024	TEPAT WAKTU
		LEMPENI	APBDESA	27 DESEMBER 2024	TEPAT WAKTU
		TEMPEH TENGAH	APBDESA	27 DESEMBER 2024	TEPAT WAKTU
		KALIWUNGU	APBDESA	30 DESEMBER 2024	TEPAT WAKTU
		TEMPEH LOR	APBDESA	27 DESEMBER 2024	TEPAT WAKTU
		BESUK	APBDESA	31 DESEMBER 2024	TEPAT WAKTU
		JATISARI	APBDESA	30 DESEMBER 2024	TEPAT WAKTU
		PULO	APBDESA	30 DESEMBER 2024	TEPAT WAKTU
		GESANG	APBDESA	27 DESEMBER 2024	TEPAT WAKTU
		JOKARTO	APBDESA	27 DESEMBER 2024	TEPAT WAKTU
PANDANARUM	APBDESA	30 DESEMBER 2024	TEPAT WAKTU		
6	KUNIR	JATIMULYO	APBDESA	27 DESEMBER 2024	TEPAT WAKTU
		JATIREJO	APBDESA	27 DESEMBER 2024	TEPAT WAKTU
		JATIGONO	APBDESA	27 DESEMBER 2024	TEPAT WAKTU
		SUKOREJO	APBDESA	30 DESEMBER 2024	TEPAT WAKTU
		SUKOSARI	APBDESA	27 DESEMBER 2024	TEPAT WAKTU
		KUNIR KIDUL	APBDESA	27 DESEMBER 2024	TEPAT WAKTU
		KUNIR LOR	APBDESA	27 DESEMBER 2024	TEPAT WAKTU
		KEDUNGMORO	APBDESA	27 DESEMBER 2024	TEPAT WAKTU
		KARANGLO	APBDESA	31 DESEMBER 2024	TEPAT WAKTU
		KABUARAN	APBDESA	27 DESEMBER 2024	TEPAT WAKTU
		DOROGOWOK	APBDESA	30 DESEMBER 2024	TEPAT WAKTU
7	YOSOWILANGUN	DARUNGAN	APBDESA	28 DESEMBER 2024	TEPAT WAKTU
		KRATON	APBDESA	28 DESEMBER 2024	TEPAT WAKTU
		WOTGALIH	APBDESA	28 DESEMBER 2024	TEPAT WAKTU
		TUNJUNGREJO	APBDESA	28 DESEMBER 2024	TEPAT WAKTU
		YOSOWILANGUN KIDUL	APBDESA	28 DESEMBER 2024	TEPAT WAKTU
		YOSOWILANGUN LOR	APBDESA	28 DESEMBER 2024	TEPAT WAKTU
KRAI	APBDESA	28 DESEMBER 2024	TEPAT WAKTU		

NO	NAMA KECAMATAN	DESA	DOKUMEN	TANGGAL POSTING	STATUS
		KARANGANYAR	APBDESA	28 DESEMBER 2024	TEPAT WAKTU
		KARANGREJO	APBDESA	28 DESEMBER 2024	TEPAT WAKTU
		MUNDER	APBDESA	28 DESEMBER 2024	TEPAT WAKTU
		KEBONSARI	APBDESA	28 DESEMBER 2024	TEPAT WAKTU
		KALIPEPE	APBDESA	28 DESEMBER 2024	TEPAT WAKTU
8	ROWOKANGKUNG	NOGOSARI	APBDESA	30 DESEMBER 2024	TEPAT WAKTU
		KEDUNGREJO	APBDESA	30 DESEMBER 2024	TEPAT WAKTU
		SIDOREJO	APBDESA	27 DESEMBER 2024	TEPAT WAKTU
		ROWOKANGKUNG	APBDESA	30 DESEMBER 2024	TEPAT WAKTU
		SUMBERSARI	APBDESA	30 DESEMBER 2024	TEPAT WAKTU
		DAWUHAN WETAN	APBDESA	30 DESEMBER 2024	TEPAT WAKTU
		SUMBERANYAR	APBDESA	31 DESEMBER 2024	TEPAT WAKTU
9	TEKUNG	WONOGRIYO	APBDESA	31 DESEMBER 2024	TEPAT WAKTU
		WONOSARI	APBDESA	31 DESEMBER 2024	TEPAT WAKTU
		MANGUNSARI	APBDESA	31 DESEMBER 2024	TEPAT WAKTU
		TEKUNG	APBDESA	31 DESEMBER 2024	TEPAT WAKTU
		WONOKERTO	APBDESA	31 DESEMBER 2024	TEPAT WAKTU
		TUKUM	APBDESA	31 DESEMBER 2024	TEPAT WAKTU
		KARANGBENDO	APBDESA	31 DESEMBER 2024	TEPAT WAKTU
		KLAMPOKARUM	APBDESA	31 DESEMBER 2024	TEPAT WAKTU
10	LUMAJANG	BANJARWARU	APBDESA	31 DESEMBER 2024	TEPAT WAKTU
		LABRUK LOR	APBDESA	31 DESEMBER 2024	TEPAT WAKTU
		DENOK	APBDESA	31 DESEMBER 2024	TEPAT WAKTU
		BLUKON	APBDESA	31 DESEMBER 2024	TEPAT WAKTU
		BORENG	APBDESA	31 DESEMBER 2024	TEPAT WAKTU
11	PASRUJAMBE	PASRUJAMBE	APBDESA	31 DESEMBER 2024	TEPAT WAKTU
		JAMBKUMBU	APBDESA	31 DESEMBER 2024	TEPAT WAKTU
		SUKOREJO	APBDESA	31 DESEMBER 2024	TEPAT WAKTU
		JAMBEARUM	APBDESA	31 DESEMBER 2024	TEPAT WAKTU
		KERTOSARI	APBDESA	31 DESEMBER 2024	TEPAT WAKTU
		PAGOWAN	APBDESA	31 DESEMBER 2024	TEPAT WAKTU
		KARANGANOM	APBDESA	31 DESEMBER 2024	TEPAT WAKTU
12	SENDURO	PURWOREJO	APBDESA	31 DESEMBER 2024	TEPAT WAKTU
		SARIKEMUNING	APBDESA	31 DESEMBER 2024	TEPAT WAKTU
		PANDANSARI	APBDESA	31 DESEMBER 2024	TEPAT WAKTU
		SENDURO	APBDESA	31 DESEMBER 2024	TEPAT WAKTU
		BURNO	APBDESA	30 DESEMBER 2024	TEPAT WAKTU
		KANDANGTEPUS	APBDESA	30 DESEMBER 2024	TEPAT WAKTU
		KANDANGAN	APBDESA	30 DESEMBER 2024	TEPAT WAKTU
		BEDAYU	APBDESA	31 DESEMBER 2024	TEPAT WAKTU
		BEDAYUTALANG	APBDESA	30 DESEMBER 2024	TEPAT WAKTU
		WONOCEPOKOAYU	APBDESA	9 JANUARI 2025	TIDAK TEPAT WAKTU
		ARGOSARI	APBDESA	30 DESEMBER 2024	TEPAT WAKTU
RANUPANI	APBDESA	30 DESEMBER 2024	TEPAT WAKTU		
13	GUCIALIT	WONOKERTO	APBDESA	30 DESEMBER 2024	TEPAT WAKTU
		PAKEL	APBDESA	31 DESEMBER 2024	TEPAT WAKTU
		KENONGO	APBDESA	31 DESEMBER 2024	TEPAT WAKTU
		GUCIALIT	APBDESA	31 DESEMBER 2024	TEPAT WAKTU
		DADAPAN	APBDESA	31 DESEMBER 2024	TEPAT WAKTU
		KERTOWONO	APBDESA	30 DESEMBER 2024	TEPAT WAKTU
		TUNJUNG	APBDESA	22 JANUARI 2025	TIDAK TEPAT WAKTU
		JERUK	APBDESA	30 JANUARI 2025	TIDAK TEPAT WAKTU
		SOMBO	APBDESA	31 DESEMBER 2024	TEPAT WAKTU
14	PADANG	BARAT	APBDESA	30 DESEMBER 2024	TEPAT WAKTU
		BABAKAN	APBDESA	31 DESEMBER 2024	TEPAT WAKTU
		MOJO	APBDESA	30 DESEMBER 2024	TEPAT WAKTU
		BODANG	APBDESA	30 DESEMBER 2024	TEPAT WAKTU
		KEDAWUNG	APBDESA	30 DESEMBER 2024	TEPAT WAKTU
		PADANG	APBDESA	31 DESEMBER 2024	TEPAT WAKTU
		KALISEMUT	APBDESA	7 JANUARI 2025	TIDAK TEPAT WAKTU
		MERAKAN	APBDESA	23 JANUARI 2025	TIDAK TEPAT WAKTU
TANGGUNG	APBDESA	31 DESEMBER 2024	TEPAT WAKTU		
15	SUKODONO	KLANTING	APBDESA	30 DESEMBER 2024	TEPAT WAKTU
		KEBONAGUNG	APBDESA	30 DESEMBER 2024	TEPAT WAKTU
		KARANGSARI	APBDESA	31 DESEMBER 2024	TEPAT WAKTU
		DAWUHAN LOR	APBDESA	31 DESEMBER 2024	TEPAT WAKTU
		KUTORENON	APBDESA	30 DESEMBER 2024	TEPAT WAKTU
		SELOKBESUKI	APBDESA	30 DESEMBER 2024	TEPAT WAKTU
		SUMBEREJO	APBDESA	30 DESEMBER 2024	TEPAT WAKTU

NO	NAMA KECAMATAN	DESA	DOKUMEN	TANGGAL POSTING	STATUS
		URANGGANTUNG	APBDESA	31 DESEMBER 2024	TEPAT WAKTU
		SELOKGONDANG	APBDESA	30 DESEMBER 2024	TEPAT WAKTU
		BONDYOYUDO	APBDESA	30 DESEMBER 2024	TEPAT WAKTU
16	KEDUNGGAJANG	PANDANSARI	APBDESA	8 JANUARI 2024	TIDAK TEPAT WAKTU
		KRASAK	APBDESA	30 DESEMBER 2024	TEPAT WAKTU
		KEDUNGGAJANG	APBDESA	30 DESEMBER 2024	TEPAT WAKTU
		WONOREJO	APBDESA	30 DESEMBER 2024	TEPAT WAKTU
		UMBUL	APBDESA	30 DESEMBER 2024	TEPAT WAKTU
		CURAHPETUNG	APBDESA	31 DESEMBER 2024	TEPAT WAKTU
		GROBOGAN	APBDESA	30 DESEMBER 2024	TEPAT WAKTU
		BENCE	APBDESA	31 DESEMBER 2024	TEPAT WAKTU
		JATISARI	APBDESA	30 DESEMBER 2024	TEPAT WAKTU
		TEMPURSARI	APBDESA	30 DESEMBER 2024	TEPAT WAKTU
		BANDARAN	APBDESA	30 DESEMBER 2024	TEPAT WAKTU
		SAWARAN KULON	APBDESA	30 DESEMBER 2024	TEPAT WAKTU
17	JATIROTO	BANYUPUTIH KIDUL	APBDESA	30 DESEMBER 2024	TEPAT WAKTU
		ROJOPOLO	APBDESA	30 DESEMBER 2024	TEPAT WAKTU
		KALIBOTO KIDUL	APBDESA	31 DESEMBER 2024	TEPAT WAKTU
		KALIBOTO LOR	APBDESA	30 DESEMBER 2024	TEPAT WAKTU
		SUKOSARI	APBDESA	30 DESEMBER 2024	TEPAT WAKTU
		JATIROTO	APBDESA	30 DESEMBER 2024	TEPAT WAKTU
18	RANDUAGUNG	BANYUPUTIH LOR	APBDESA	30 DESEMBER 2024	TEPAT WAKTU
		KALIDILEM	APBDESA	30 DESEMBER 2024	TEPAT WAKTU
		TUNJUNG	APBDESA	30 DESEMBER 2024	TEPAT WAKTU
		GEDANGMAS	APBDESA	24 DESEMBER 2024	TEPAT WAKTU
		KALIPENGGUNG	APBDESA	30 DESEMBER 2024	TEPAT WAKTU
		RANULOGONG	APBDESA	31 DESEMBER 2024	TEPAT WAKTU
		RANDUAGUNG	APBDESA	27 DESEMBER 2024	TEPAT WAKTU
		LEDOKTEMPURO	APBDESA	30 DESEMBER 2024	TEPAT WAKTU
		PEJARAKAN	APBDESA	30 DESEMBER 2024	TEPAT WAKTU
		BUWEK	APBDESA	27 DESEMBER 2024	TEPAT WAKTU
		RANUWURUNG	APBDESA	31 DESEMBER 2024	TEPAT WAKTU
		SALAK	APBDESA	06 JANUARI 2025	TIDAK TEPAT WAKTU
19	KLAKAH	KEBONAN	APBDESA	31 DESEMBER 2024	TEPAT WAKTU
		KUDUS	APBDESA	31 DESEMBER 2024	TEPAT WAKTU
		DUREN	APBDESA	31 DESEMBER 2024	TEPAT WAKTU
		SUMBERWRINGIN	APBDESA	31 DESEMBER 2024	TEPAT WAKTU
		PAPRINGAN	APBDESA	31 DESEMBER 2024	TEPAT WAKTU
		RANUPAKIS	APBDESA	31 DESEMBER 2024	TEPAT WAKTU
		TEGALRANDU	APBDESA	31 DESEMBER 2024	TEPAT WAKTU
		KLAKAH	APBDESA	31 DESEMBER 2024	TEPAT WAKTU
		MLAWANG	APBDESA	31 DESEMBER 2024	TEPAT WAKTU
		SRUNI	APBDESA	31 DESEMBER 2024	TEPAT WAKTU
				TEGALCIUT	APBDESA
		SAWARAN LOR	APBDESA	31 DESEMBER 2024	TEPAT WAKTU
20	RANUYOSO	JENGGRONG	APBDESA	31 DESEMBER 2024	TEPAT WAKTU
		MENINJO	APBDESA	31 DESEMBER 2024	TEPAT WAKTU
		TEGALBANGSRI	APBDESA	31 DESEMBER 2024	TEPAT WAKTU
		SUMBERPETUNG	APBDESA	31 DESEMBER 2024	TEPAT WAKTU
		ALUN-ALUN	APBDESA	31 DESEMBER 2024	TEPAT WAKTU
		RANUBEDALI	APBDESA	31 DESEMBER 2024	TEPAT WAKTU
		RANUYOSO	APBDESA	31 DESEMBER 2024	TEPAT WAKTU
		WONOAYU	APBDESA	31 DESEMBER 2024	TEPAT WAKTU
		PENAWUNGAN	APBDESA	31 DESEMBER 2024	TEPAT WAKTU
		WATES KULON	APBDESA	31 DESEMBER 2024	TEPAT WAKTU
		WATES WETAN	APBDESA	31 DESEMBER 2024	TEPAT WAKTU
21	SUMBERSUKO	SUMBERSUKO	APBDESA	27 DESEMBER 2024	TEPAT WAKTU
		KEBONSARI	APBDESA	30 DESEMBER 2024	TEPAT WAKTU
		GRATI	APBDESA	27 DESEMBER 2024	TEPAT WAKTU
		LABRUK KIDUL	APBDESA	27 DESEMBER 2024	TEPAT WAKTU
		MOJOSARI	APBDESA	27 DESEMBER 2024	TEPAT WAKTU
		SENTUL	APBDESA	27 DESEMBER 2024	TEPAT WAKTU
		PURWOSONO	APBDESA	27 DESEMBER 2024	TEPAT WAKTU
		PETAHUNAN	APBDESA	30 DESEMBER 2024	TEPAT WAKTU

APBDESA TA. 2025 TEPAT WAKTU  
APBDESA TA. 2025 TIDAK TEPAT WAKTU  
JUMLAH APBDESA TA. 2025

186  
12  
198

186/198\*100

93,94%

## BUM DESA YANG TERDAFTAR PADA SISTEM INFORMASI DESA KEMENDES

Data Per 30 September 2025

No	Name	Desa	Kecamatan	Status Badan Hukum	Status Unit Usaha
1	BUM DESA SUMBER REJEKI PUNDUNGSARI	PUNDUNGSARI	TEMPURSARI	Dokumen Badan Hukum Terverifikasi	Aktif
2	BUM DESA SUMBER MAKMUR SIDOMULYO	SIDOMULYO	PRONOJIWO	Dokumen Badan Hukum Terverifikasi	Aktif
3	BUM DESA KUNCUP LERENG SEMERU PRONOJIWO	PRONOJIWO	PRONOJIWO	Dokumen Badan Hukum Terverifikasi	Aktif
4	BUM DESA ANUGERAH TAMANAYU	TAMANAYU	PRONOJIWO	Dokumen Badan Hukum Terverifikasi	Aktif
5	BUM DESA SENTOSA CANDIPURO	CANDIPURO	CANDIPURO	Dokumen Badan Hukum Terverifikasi	Aktif
6	BUM DESA MEKAR JAYA SUMBEREJO	SUMBEREJO	CANDIPURO	Dokumen Badan Hukum Terverifikasi	Aktif
7	BUM DESA SUMBER REZEKI SUMBER WULUH	SUMBER WULUH	CANDIPURO	Dokumen Badan Hukum Terverifikasi	Aktif
8	BUM DESA TIRTOSARI MAKMUR PENANGGAL	PENANGGAL	CANDIPURO	Dokumen Badan Hukum Terverifikasi	Aktif
9	BUM DESA TAMBAHJAYA TAMBAHREJO	TAMBAHREJO	CANDIPURO	Dokumen Badan Hukum Terverifikasi	Aktif
10	BUM DESA SUMBER ABADI TUMPENG	TUMPENG	CANDIPURO	Dokumen Badan Hukum Terverifikasi	Aktif
11	BUM DESA SUMBER ARUM KALIBENDO	KALIBENDO	PASIRIAN	Dokumen Badan Hukum Terverifikasi	Aktif
12	BUM DESA BAROKAH JAYA ABADI CONDR	CONDRO	PASIRIAN	Dokumen Badan Hukum Terverifikasi	Aktif
13	BUM DESA PASIRIAN RAHARJO PASIRIAN	PASIRIAN	PASIRIAN	Dokumen Badan Hukum Terverifikasi	Aktif
14	BUM DESA SOPONYONO TEMPEH KIDUL	TEMPEH KIDUL	TEMPEH	Dokumen Badan Hukum Terverifikasi	Aktif
15	BUM DESA GESANG BERSATU GESANG	GESANG	TEMPEH	Dokumen Badan Hukum Terverifikasi	Aktif
16	BUM DESA SUMBER REJEKI JOKARTO	JOKARTO	TEMPEH	Dokumen Badan Hukum Terverifikasi	Aktif
17	BUM DESA YUDISTIRA KUJA KUNIR LOR	KUNIR LOR	KUNIR	Dokumen Badan Hukum Terverifikasi	Aktif
18	BUM DESA JAYA AGUNG YOSOWILANGUN LOR	YOSOWILANGUN LOR	YOSOWILANGUN	Dokumen Badan Hukum Terverifikasi	Aktif
19	BUM DESA SEHATI SIDOREJO	SIDOREJO	ROWOKANGKUNG	Dokumen Badan Hukum Terverifikasi	Aktif
20	BUM DESA GERBANG MANDIRI LABRUK LOR	LABRUK LOR	LUMAJANG	Dokumen Badan Hukum Terverifikasi	Aktif
21	BUM DESA SINAR LANGGENG SARIKEMUNING SARIKEMUNING	SARIKEMUNING	SENDURO	Dokumen Badan Hukum Terverifikasi	Aktif
22	BUM DESA SUMBERSARI PANDANSARI	PANDANSARI	SENDURO	Dokumen Badan Hukum Terverifikasi	Aktif
23	BUM DESA ANOMAN BURNO	BURNO	SENDURO	Dokumen Badan Hukum Terverifikasi	Aktif
24	BUM DESA BAROKAH CEMPAKA WONOCEPOKOAYU	WONOCEPOKOAYU	SENDURO	Dokumen Badan Hukum Terverifikasi	Aktif
25	BUM DESA EDELWEISS RANUPANI	RANUPANI	SENDURO	Dokumen Badan Hukum Terverifikasi	Aktif
26	BUM DESA WONOTIRTO SEJAHTERA WONOKERTO	WONOKERTO	GUCIALIT	Dokumen Badan Hukum Terverifikasi	Aktif
27	BUM DESA GUMARA GUCIALIT	GUCIALIT	GUCIALIT	Dokumen Badan Hukum Terverifikasi	Aktif
28	BUM DESA SUMBER ABADI BODANG	BODANG	PADANG	Dokumen Badan Hukum Terverifikasi	Aktif
29	BUM DESA MINAK KONCAR KUTORENON	KUTORENON	SUKODONO	Dokumen Badan Hukum Terverifikasi	Aktif
30	BUM DESA WIRARAJA WONOREJO	WONOREJO	KEDUNGJAJANG	Dokumen Badan Hukum Terverifikasi	Aktif
31	BUM DESA JAYA MAKMUR JATIROTO JATIROTO	JATIROTO	JATIROTO	Dokumen Badan Hukum Terverifikasi	Aktif
32	BUM DESA TUNJUNG MUDA TUNJUNG	TUNJUNG	RANDUAGUNG	Dokumen Badan Hukum Terverifikasi	Aktif
33	BUM DESA RATU AGUNG BUWEK	BUWEK	RANDUAGUNG	Dokumen Badan Hukum Terverifikasi	Aktif
34	BUM DESA SUMBER MURNI RANUBEDALI	RANUBEDALI	RANUYOSO	Dokumen Badan Hukum Terverifikasi	Aktif
35	BUM DESA SAHABAT SUMBERSUKO	SUMBERSUKO	SUMBERSUKO	Dokumen Badan Hukum Terverifikasi	Aktif
36	BUM DESA SRIKANDI KEBONSARI	KEBONSARI	SUMBERSUKO	Dokumen Badan Hukum Terverifikasi	Aktif
37	BUM DESA TIRTA ARUM PETAHUNAN	PETAHUNAN	SUMBERSUKO	Dokumen Badan Hukum Terverifikasi	Aktif
38	BUM DESA RAMAI JAYA KRATON	KRATON	YOSOWILANGUN	Dokumen Badan Hukum Terverifikasi	Aktif

No	Name	Desa	Kecamatan	Status Badan Hukum	Status Unit Usaha
39	BUM DESA KARYA LUHUR SUMBERURIP	SUMBERURIP	PRONOJIWO	Dokumen Badan Hukum Terverifikasi	Aktif
40	BUM DESA IDAMAN SEJATI JERUK	JERUK	GUCIALIT	Dokumen Badan Hukum Terverifikasi	Aktif
41	BUM DESA PODOMORO PANDANARUM	PANDANARUM	TEMPEH	Dokumen Badan Hukum Terverifikasi	Aktif
42	BUM DESA PANCA KARYA MANDIRI KANDANGAN	KANDANGAN	SENDURO	Dokumen Badan Hukum Terverifikasi	Aktif
43	BUM DESA SEMERU LESTARI PASRUJAMBE	PASRUJAMBE	PASRUJAMBE	Dokumen Badan Hukum Terverifikasi	Aktif
44	BUM DESA GUYUB RUKUN BULUREJO	BULUREJO	TEMPURSARI	Dokumen Badan Hukum Terverifikasi	Aktif
45	BUM DESA UNGGUL BERKAH GEDANGMAS	GEDANGMAS	RANDUAGUNG	Dokumen Badan Hukum Terverifikasi	Aktif
46	BUM DESA MOJOSARI MANDIRI MOJOSARI	MOJOSARI	SUMBERSUKO	Dokumen Badan Hukum Terverifikasi	Aktif
47	BUM DESA SUMBER REJEKI	RANDUAGUNG	RANDUAGUNG	Dokumen Badan Hukum Terverifikasi	Aktif
48	BUM DESA JATIGONO MAJU JATIGONO	JATIGONO	KUNIR	Dokumen Badan Hukum Terverifikasi	Aktif
49	BUM DESA RATU NIAGA ROJOPOLO	ROJOPOLO	JATIROTO	Dokumen Badan Hukum Terverifikasi	Aktif
50	BUM DESA KEDUNGREJO MULYO	KEDUNGREJO	ROWOKANGKUNG	Dokumen Badan Hukum Terverifikasi	Aktif
51	BUM DESA TARUNA JAYA BABAKAN	BABAKAN	PADANG	Dokumen Badan Hukum Terverifikasi	Aktif
52	BUM DESA MANDIRI MUNDER	MUNDER	YOSOWILANGUN	Dokumen Badan Hukum Terverifikasi	Aktif
53	BUM DESA SUMBER AMERTHA TEMPURREJO	TEMPURREJO	TEMPURSARI	Dokumen Badan Hukum Terverifikasi	Aktif
54	BUM DESA MITRA SEMERU SUMBER MUJUR	SUMBER MUJUR	CANDIPURO	Dokumen Badan Hukum Terverifikasi	Aktif
55	BUM DESA JAYA MANDIRI KEBONSARI	KEBONSARI	YOSOWILANGUN	Dokumen Badan Hukum Terverifikasi	Aktif
56	BUM DESA SRIKANDI TEMPEH TENGAH	TEMPEH TENGAH	TEMPEH	Dokumen Badan Hukum Terverifikasi	Aktif
57	BUM DESA TIRTA AMANAH JARIT	JARIT	CANDIPURO	Dokumen Badan Hukum Terverifikasi	Aktif
58	BUM DESA AMANAH BARAT	BARAT	PADANG	Dokumen Badan Hukum Terverifikasi	Aktif
59	BUM DESA ALUN ALUN MANDIRI SEJAHTERA ALUN-ALUN	ALUN-ALUN	RANUYOSO	Dokumen Badan Hukum Terverifikasi	Aktif
60	BUM DESA TIRTHA JAYA MOJO	MOJO	PADANG	Dokumen Badan Hukum Terverifikasi	Aktif

**DATA POTENSI LEMBAGA ADAT DESA (LAD)  
KABUPATEN LUMAJANG  
TAHUN 2025**

No	Kabupaten	Kecamatan	Desa		LEMBAGA/ PAGUYUBAN/ KELOMPOK YANG BERPOTENSI MENJADI LAD			LAD					Keterangan	
					Nama	Dalam Bentuk Keg. Agama	Lain- lain	Nama	Dalam Bentuk Keg. Agama	Lain- lain	Alamat Sekretariat	Nama Ketua/Pengurus & Nomor Telp.HP		Regulasi Perdes/ Dokumen
1	Lumajang	Tempursari	1	Tegalrejo	Petik Laut		1				Balai Desa Tegalrejo			Sosial Budaya
			2	Tempurejo	Bersih Desa		1				Balai Desa Tempurejo			Sosial Budaya
		Pronojiwo	3	Sidomulyo	Ruwatan Desa		1				Balai Desa Sidomulyo			Sosial Budaya
			4	Tamanayu	Festival Salak		1			1	Balai Desa Tamanayu			Sosial Budaya
		Pasirian	5	Pasirian	Ruwatan Desa		1				Balai Desa Pasirian			Sosial Budaya
			6	Nguter	Ruwatan Desa		1				Balai Desa Nguter			Sosial Budaya
			7	Kalibendo	Ruwatan Desa		1				Balai Desa Kalibendo			Sosial Budaya
			8	Bago	Ruwatan Desa		1				Balai Desa Bago			Sosial Budaya
			9	Condro	Ruwatan Desa		1				Balai Desa Condro			Sosial Budaya
			10	Selok Awar-awar	Ruwatan Desa		1				Balai Desa Selok Awar-awar			Sosial Budaya
					Arakan Kucing		1				Balai Desa Selok Awar-awar			Sosial Budaya
		Candipuro	11	Penanggal	Ruwat air		1				Balai Desa Penanggal			Sosial Budaya
			12	Kloposawit	Sedekah Desa		1			1	Balai Desa Kloposawit	Marjoko 085331802963		Sosial Budaya
			13	Tambahrejo	Sampyongan/ Ojong		1			1	Balai Desa Tambahrejo			Sosial Budaya
		Tempeh	14	Kaliwungu	Sedekah Desa		1			1	Balai Desa Kaliwungu	Razanah Hamdan 085204571840		Sosial Budaya

No	Kabupaten	Kecamatan	Desa		LEMBAGA/ PAGUYUBAN/ KELOMPOK YANG BERPOTENSI MENJADI LAD			LAD					Keterangan		
					Nama	Dalam Bentuk Keg. Agama	Lain-lain	Nama	Dalam Bentuk Keg. Agama	Lain-lain	Alamat Sekretariat	Nama Ketua/Pengurus & Nomor Telp.HP		Regulasi Perdes/ Dokumen	
		Kunir	15	Kunir Kidul	Banjir Tahu		1				1	Balai Desa Kunir Kidul			Sosial Budaya
		Senduro	16	Purworejo	Sedekah Desa		1					Balai Desa Purworejo			Sosial Budaya
			17	Sarikemuning	Sedekah Desa		1					Balai Desa Sarikemuning			Sosial Budaya
			18	Pandansari	Sedekah Desa		1					Balai Desa Pandansari			Sosial Budaya
			19	Kandangan	Suku Tengger Brang Wetan		1	Suku Tengger Brang Wetan			1	Dusun Krajan RT 005 RW 006	Gatot Harjo Wardoyo 085855107611	Perdes LAD No. 4 Tahun 2023 tanggal 26 Juni 2023	Sosial Budaya
			20	Burno	Sedekah Desa		1	Lembaga Adat Desa Burno			1	Balai Desa Burno	-	Perdes LAD Nomor 8 Tahun 2022 Tanggal 30 Desember 2022	Sosial Budaya
			21	Kandangan	Sedekah Desa		1	SUKU TENGGER BRANG WETAN			1	Balai Desa Kandangan	Gatot Harjo Wardoyo	Perdes LAD Nomor 188/18/427.92.07 /2023 Tanggal 05 Agustus 2023	Sosial Budaya
			22	Kandangtepus	Sedekah Desa		1					Balai Desa Kandangtepus			Sosial Budaya
			23	Wonocempokoayu	Sedekah Desa		1					Balai Desa Wonocempokoayu			Sosial Budaya
			24	Bedayu	Sedekah Desa		1					Balai Desa Bedayu			Sosial Budaya
			25	Bedayu talang	Sedekah Desa		1					Balai Desa Bedayu talang			Sosial Budaya
			26	Argosari	Adat Tengger		1	HYANG NDONO SARI			1	Balai Desa Argosari		Perdes LAD Nomor 16 Tahun 2020 Tanggal 10 Januari 2020	Sosial Budaya Keagamaan

No	Kabupaten	Kecamatan	Desa		LEMBAGA/ PAGUYUBAN/ KELOMPOK YANG BERPOTENSI MENJADI LAD			LAD					Keterangan		
					Nama	Dalam Bentuk Keg. Agama	Lain-lain	Nama	Dalam Bentuk Keg. Agama	Lain-lain	Alamat Sekretariat	Nama Ketua/Pengurus & Nomor Telp.HP		Regulasi Perdes/ Dokumen	
			27	Ranupani	Adat Tengger		1	LANGGENG BASUKI			1	Balai Desa Ranupani	Misnan	Perdes LAD Nomor 188/07/427.92.12 /2023 tanggal 5 Juni 2023	Sosial Budaya Keagamaan
		Pasrujambe	28	Karanganom	Barik'an (memperingati kemerdekaan RI)	1			1			Balai Desa Karanganom			Sosial Budaya
			29	Pagowan	Sedekah Desa		1			1		Balai Desa Pagowan			Sosial Budaya
		Gucialit	30	Pakel	Sedekah Desa		1					Balai Desa Pakel			Sosial Budaya
			31	Kenongo	Sedekah Desa		1					Balai Desa Kenongo			Sosial Budaya
			32	Gucialit	Sedekah Desa		1	Lembaga Adat Desa Guccialit			1	Balai Desa Guccialit	Ngadi	Perdes LAD Nomor : 100.3/18/427.93.04/2024 Tanggal 5 Januari 2024	Sosial Budaya
			33	Sombo	Ruwatan Desa		1			1		Balai Desa Sombo			Sosial Budaya
		Padang	34	Tanggung	GrebeK Suro		1					Balai Desa Tanggung			Sosial Budaya
			35	Kedawung	Selamatan Desa		1					Balai Desa Kedawung			Sosial Budaya
			36	Merakan	Sedekah Desa		1			1		Balai Desa Merakan			Sosial Budaya
		Yosowilangun	37	Yosowilangun Lor	Sedekah Desa		1					Balai Desa Yosowilangun Lor			Sosial Budaya
			38	Yosowilangun Kidul	Sedekah Desa							Balai Desa Yosowilangun Kidul			Sosial Budaya

No	Kabupaten	Kecamatan	Desa		LEMBAGA/ PAGUYUBAN/ KELOMPOK YANG BERPOTENSI MENJADI LAD			LAD					Keterangan	
					Nama	Dalam Bentuk Keg. Agama	Lain- lain	Nama	Dalam Bentuk Keg. Agama	Lain- lain	Alamat Sekretariat	Nama Ketua/Pengurus & Nomor Telp.HP		Regulasi Perdes/ Dokumen
			39	Tunjungrejo	Undhuh-Undhuh		1			1	Balai Desa Tunjungrejo			Sosial Budaya
			40	Darungan	Ludruk		1			1	Balai Desa Darungan			Sosial Budaya
		Tekung	41	Tekung	Selamatan Desa	1			1		Balai Desa Tekung			Sosial Budaya
		Rowokangkung	42	Dawuhan Wetan	Karapan Kerbau		1			1	Balai Desa Dawuhan Wetan			Sosial Budaya
		Lumajang	43	Kelurahan Jogotrunan	Sasana Budaya Sabda Aji		1			1	Balai Lurah Jogotrunan			Sosial Budaya
			44	Kelurahan Ditotrunan	Sapar Agung		1			1	Balai Lurah Ditotrunan			Sosial Budaya
JUMLAH								6 LEMBAGA ADAT DESA						

**DATA SWADAYA MURNI MASYARAKAT  
DAN SWADAYA PENDUKUNG PROGRAM/KEGIATAN  
JULI s.d SEPTEMBER 2025**

No.	Kecamatan	Swadaya Murni	Swadaya Pendukung	Jumlah Swadaya
1	2	3	4	5
1	Tempursari	-	-	-
2	Pronojiwo	-	-	-
3	Candipuro	-	-	-
4	Pasirian	115.995.500	-	115.995.500
5	Tempeh	587.900.000	20.450.000	608.350.000
6	Kunir	62.860.000	9.370.000	72.230.000
7	Yosowilangun	88.800.000	1.900.000	90.700.000
8	Rowokangkung	692.340.000	1.285.000	693.625.000
9	Tekung	176.627.500	3.125.000	179.752.500
10	Lumajang	18.172.000	-	18.172.000
11	Pasrujambe	4.250.000	5.750.000	10.000.000
12	Senduro	2.001.950.000	84.200.000	2.086.150.000
13	Gucialit	-	-	-
14	Padang	5.000.000	268.829.000	273.829.000
15	Sukodono	647.160.000	8.300.000	655.460.000
16	Kedungjajang	141.244.000	109.000.000	250.244.000
17	Jatiroto	-	-	-
18	Randuagung	209.200.000	-	209.200.000
19	Klakah	1.166.500.000	7.600.000	1.174.100.000
20	Ranuyoso	6.000.000	2.000.000	8.000.000
21	Sumbersuko	-	-	-
<b>JUMLAH KESELURUHAN</b>		<b>5.923.999.000</b>	<b>521.809.000</b>	<b>6.445.808.000</b>

SUMBER DATA :

[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TW0tJyqO6Ti\\_RncGDDPC6ZogbEdX69f3AAOlrow8kiQ/edit?usp=sharing](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TW0tJyqO6Ti_RncGDDPC6ZogbEdX69f3AAOlrow8kiQ/edit?usp=sharing)

**KETERANGAN :**

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase Dana Swadaya} &= \frac{\text{Jumlah Dana Swadaya Masyarakat}}{\text{Jumlah Anggaran APBDes se Kabupaten Lumajang}} \times 100 \\
 &= \frac{6.445.808.000}{404.229.251.625} \times 100 \\
 &= \mathbf{1,59 \%}
 \end{aligned}$$